

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Artikulasi Kebijakan Nasional dalam Konteks Lokalitas: Analisis Implementatif Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi di Kota Bima

Firmansyah^{1*}

¹Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Kota Bima, 84112

Email: firmansyah@stisipmbojo-bima.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Send 27/10/2024

Received 03/11/2024

Accepted 10/12/2024

Abstract

This study aims to critically examine the dynamics of the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) policy within higher education institutions in Kota Bima, with particular emphasis on the interplay between national policy design and the adaptive capacity of local institutions in peripheral contexts. The study employs a descriptive qualitative approach with an exploratory strategy, utilizing data collection techniques including field observations, in-depth interviews with institutional actors (leaders, lecturers, and students), and institutional document analysis. The data were subsequently analyzed through systematic coding, categorization, and thematic interpretation to identify patterns of implementation and policy distortions. The findings reveal that the implementation of MBKM does not follow a linear trajectory; rather, it is characterized by processes of negotiation, reinterpretation, and contextual adaptation shaped by constraints in human resources, digital infrastructure, partnership networks, and students' economic capacity. These conditions have stimulated the emergence of institutional improvisation practices grounded in community-based initiatives and local collaborations, while simultaneously indicating disparities in access and the prevalence of administrative evaluation bias. Consequently, policy implementation is better understood as a complex interaction between policy structures, local institutional capacities, and the dynamics of educational inequality.

Keywords: Local Adaptation; Educational Inequality; MBKM; Higher Education.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada perguruan tinggi di Kota Bima dengan menitikberatkan pada relasi antara desain kebijakan nasional dan kapasitas adaptif institusi lokal dalam konteks wilayah perifer. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui strategi eksploratif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap aktor kelembagaan (pimpinan, dosen, dan mahasiswa), serta analisis dokumen institusional, yang selanjutnya dianalisis melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi tematik untuk mengungkap pola implementasi dan distorsi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi MBKM tidak berlangsung secara linear, melainkan melalui proses negosiasi, reinterpretasi, dan adaptasi kontekstual yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, jejaring kemitraan, serta kapasitas ekonomi mahasiswa. Kondisi tersebut mendorong munculnya praktik improvisasi institusional berbasis komunitas dan kolaborasi lokal, sekaligus mengindikasikan adanya ketimpangan akses dan bias evaluasi administratif, sehingga

implementasi kebijakan lebih mencerminkan interaksi kompleks antara struktur kebijakan, kapasitas lokal, dan dinamika ketidaksetaraan pendidikan.

Kata kunci: *Adaptasi Lokal; Educational Inequality; MBKM; Pendidikan Tinggi.*

*Firmansyah

E-mail : firmansyah@stisipmbojo-bima.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-21 telah menggeser secara fundamental struktur ekonomi, pola produksi, serta konfigurasi pasar tenaga kerja global, sehingga memunculkan tuntutan baru terhadap sistem pendidikan tinggi sebagai produsen utama sumber daya manusia berpengetahuan (Al Anshori & Syam, 2021). Transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan jenis pekerjaan, tetapi juga perubahan karakter pekerjaan itu sendiri yang semakin berbasis pengetahuan, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan adaptif terhadap perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat (Widawati & Anwar, 2023). Dalam konteks ini, pendidikan tinggi tidak lagi dapat beroperasi dengan paradigma lama yang menempatkan mahasiswa sebagai penerima pengetahuan pasif, melainkan harus bertransformasi menjadi ekosistem pembelajaran dinamis yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar lintas disiplin, lintas sektor, dan lintas ruang sosial (Arisandi et al., 2022).

Perubahan lanskap dunia kerja yang semakin fleksibel dan tidak terstruktur secara linear menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga kompetensi transversal seperti kemampuan pemecahan masalah kompleks, komunikasi interpersonal, manajemen diri, literasi digital, serta kemampuan bekerja dalam lingkungan multidisiplin (Mailin, 2021). Kondisi ini menciptakan tekanan institusional terhadap perguruan tinggi untuk merombak sistem kurikulum, metode pembelajaran, sistem evaluasi, serta pola kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (Ulum et al., 2023). Perguruan tinggi dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan dengan indeks prestasi akademik tinggi, tetapi juga lulusan yang memiliki pengalaman praktis, kemampuan adaptif, dan kesiapan kerja yang tinggi (Aswita, 2022).

Dalam konteks Indonesia, tuntutan transformasi pendidikan tinggi tersebut direspons oleh pemerintah melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang secara konseptual dirancang sebagai kerangka kebijakan pendidikan tinggi yang fleksibel, adaptif, dan berbasis pengalaman belajar nyata (Muh. Hasan Marwiji et al., 2023). Kebijakan ini merepresentasikan perubahan paradigma dari education supply oriented menuju education demand oriented, di mana sistem pendidikan tidak lagi hanya berorientasi pada penyediaan program studi, tetapi pada kebutuhan kompetensi masa depan dan dinamika pasar kerja (Fuadi & Irdalisa, 2022). Dengan demikian, MBKM bukan sekadar kebijakan kurikulum, melainkan transformasi sistem pendidikan tinggi secara struktural dan kultural.

Secara konseptual, MBKM memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh pembelajaran di luar program studi selama tiga semester melalui berbagai skema seperti magang industri, proyek kemanusiaan, penelitian, wirausaha, asistensi mengajar, pertukaran pelajar, dan proyek independen (Arsyad & Widuhung, 2022). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa melalui pembelajaran berbasis pengalaman nyata (experiential learning), sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga memahami konteks penerapan ilmu dalam kehidupan nyata (Fuadi, 2022). Dalam perspektif pendidikan

modern, pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam membentuk kompetensi abad ke-21 dibandingkan pembelajaran konvensional berbasis kelas (Suteja, 2020).

Namun demikian, implementasi kebijakan pendidikan berskala nasional tidak selalu berjalan secara linear dan seragam di seluruh wilayah, karena setiap daerah memiliki kapasitas institusional, sumber daya, jaringan kemitraan, dan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda (Simatupang & Yuhertiana, 2021). Dalam studi kebijakan publik, fenomena ini sering disebut sebagai *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan di tingkat pusat dengan realitas implementasi di tingkat lokal. Kesenjangan ini seringkali muncul karena kebijakan dirancang dengan asumsi kapasitas institusi yang relatif seragam, padahal pada kenyataannya terdapat disparitas besar antara perguruan tinggi di kota besar dan perguruan tinggi di daerah perifer (Mutmainah et al., 2022).

Kota Bima sebagai salah satu wilayah perifer dalam sistem pendidikan tinggi nasional memiliki karakteristik kelembagaan pendidikan tinggi yang berbeda dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia (Rodiyah, 2021). Sebagian besar perguruan tinggi di Kota Bima merupakan perguruan tinggi swasta dengan kapasitas pendanaan terbatas, jaringan kemitraan industri yang masih minim, serta infrastruktur digital yang belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi kemampuan institusi dalam mengimplementasikan program-program MBKM secara optimal, terutama program yang membutuhkan mobilitas mahasiswa, kerja sama industri, serta dukungan finansial yang cukup besar (Purwanti, 2021).

Selain keterbatasan institusional, faktor sumber daya manusia juga menjadi salah satu tantangan penting dalam implementasi MBKM (Jufriadi et al., 2022). Dosen sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kurikulum memiliki peran strategis dalam merancang pembelajaran, membimbing mahasiswa, serta menjalin kerja sama dengan mitra eksternal. Namun, perubahan kurikulum yang cepat seringkali tidak diikuti dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas dosen yang memadai, sehingga banyak dosen mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan program MBKM ke dalam kurikulum program studi. Akibatnya, implementasi MBKM seringkali bersifat administratif dan formalistik tanpa diikuti transformasi pembelajaran yang substantif (Mudrikah et al., 2022).

Di sisi lain, mahasiswa sebagai subjek utama kebijakan MBKM juga menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses program-program MBKM, terutama yang berada di luar daerah atau di perusahaan besar. Program magang, pertukaran pelajar, atau proyek independen seringkali membutuhkan biaya transportasi, akomodasi, dan biaya hidup yang tidak sedikit, sehingga mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas cenderung tidak dapat mengikuti program tersebut (Yanuarsari et al., 2022). Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan akses terhadap program MBKM, di mana mahasiswa dengan modal ekonomi lebih besar memiliki kesempatan lebih luas dibandingkan mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi (Fachri et al., 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh struktur sosial ekonomi mahasiswa, kapasitas institusi, serta jaringan kemitraan yang dimiliki perguruan tinggi (Mariati, 2021). Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kondisi ini dapat menciptakan reproduksi ketimpangan pendidikan (*educational inequality*), di mana kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru berpotensi memperlebar kesenjangan antara kelompok mahasiswa yang memiliki akses sumber daya dan yang tidak memiliki akses tersebut (Dewi et al., 2022).

Selain persoalan akses mahasiswa, tantangan lain dalam implementasi MBKM adalah keterbatasan kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia usaha serta dunia industri (Suandi, 2018); (Arisandi et al., 2022). Program magang dan proyek industri sebagai salah satu inti MBKM membutuhkan jaringan kemitraan yang luas dan berkelanjutan. Namun, di daerah seperti Kota Bima yang struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor informal, pertanian, dan perdagangan kecil, jumlah industri besar yang dapat menjadi mitra MBKM sangat terbatas. Akibatnya, banyak perguruan tinggi harus berimprovisasi dengan mengembangkan program berbasis komunitas, pemerintah daerah, atau organisasi masyarakat sebagai alternatif program MBKM (Baharuddin, 2021).

Adaptasi lokal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada tingkat lokal tidak selalu mengikuti desain kebijakan secara kaku, melainkan mengalami proses reinterpretasi sesuai dengan kondisi lokal. Dalam teori implementasi kebijakan, fenomena ini sering dijelaskan melalui perspektif street-level bureaucracy, di mana aktor pelaksana kebijakan di tingkat bawah memiliki diskresi dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, implementasi MBKM di daerah tidak dapat dipahami hanya sebagai proses administratif, tetapi sebagai proses sosial yang melibatkan negosiasi, adaptasi, dan improvisasi institusi pendidikan tinggi (Santri Fahmi, 2022); (Al Anshori & Syam, 2021).

Permasalahan lain yang juga muncul dalam implementasi MBKM adalah belum adanya sistem evaluasi yang komprehensif untuk mengukur dampak program MBKM terhadap kualitas pembelajaran, kompetensi mahasiswa, dan prestasi akademik (Krishnapatria, 2021); (Widawati & Anwar, 2023). Sebagian besar perguruan tinggi masih menilai keberhasilan MBKM berdasarkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program, jumlah kerja sama yang dilakukan, atau jumlah laporan kegiatan, bukan berdasarkan peningkatan kompetensi mahasiswa atau dampak jangka panjang terhadap kesiapan kerja lulusan (Donny Sopiandiyah, 2020); (Mailin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi MBKM masih lebih berorientasi pada pemenuhan indikator administratif dibandingkan transformasi pembelajaran yang substantif.

Dalam konteks tersebut, penting untuk memahami bahwa implementasi kebijakan pendidikan tinggi tidak dapat dinilai hanya dari perspektif kepatuhan terhadap regulasi, tetapi harus dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut diadaptasi, diterjemahkan, dan diimplementasikan dalam konteks lokal yang memiliki keterbatasan sumber daya dan struktur sosial ekonomi yang berbeda (Dewi et al., 2022). Oleh karena itu, studi tentang implementasi MBKM di daerah perifer menjadi penting untuk memahami dinamika kebijakan pendidikan tinggi secara lebih komprehensif dan kontekstual (Baharuddin, 2021).

Penelitian tentang MBKM selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan jumlah publikasi yang cukup signifikan, yang menandakan bahwa kebijakan ini menjadi salah satu topik utama dalam penelitian pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada kesiapan mahasiswa, persepsi dosen, evaluasi kurikulum, integrasi teknologi pembelajaran, serta dampak MBKM terhadap pembelajaran berbasis proyek dan literasi digital. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan di perguruan tinggi besar atau di wilayah perkotaan yang memiliki sumber daya dan jaringan kemitraan yang relatif lebih baik.

Keterbatasan penelitian yang berfokus pada perguruan tinggi di daerah perifer menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dalam literatur akademik tentang implementasi MBKM. Padahal, perguruan tinggi di daerah memiliki tantangan implementasi yang berbeda dibandingkan perguruan tinggi di kota besar, seperti

keterbatasan industri mitra, keterbatasan pendanaan, keterbatasan infrastruktur digital, serta keterbatasan mobilitas mahasiswa (Santri Fahmi, 2022). Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada implementasi MBKM di daerah seperti Kota Bima menjadi penting untuk mengisi kesenjangan penelitian yang belum banyak dieksplorasi (Krishnapatria, 2021).

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur persepsi atau tingkat kepuasan mahasiswa terhadap program MBKM, sementara penelitian yang menggali dinamika implementasi kebijakan dari perspektif institusi, dosen, dan mahasiswa secara mendalam masih relatif terbatas. Padahal, implementasi kebijakan pendidikan merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui angka dan statistik, tetapi membutuhkan pendekatan kualitatif untuk memahami proses, dinamika, dan interaksi antar aktor dalam implementasi kebijakan.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya memahami implementasi MBKM bukan hanya sebagai program pendidikan, tetapi sebagai fenomena kebijakan publik yang melibatkan interaksi antara pemerintah, perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat MBKM dari perspektif kurikulum atau pembelajaran, tetapi dari perspektif implementasi kebijakan, kapasitas institusi, adaptasi lokal, dan ketimpangan akses pendidikan.

Dalam konteks pendidikan tinggi di daerah, implementasi kebijakan nasional seringkali menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap regulasi pusat dan keterbatasan kapasitas lokal. Perguruan tinggi di daerah harus tetap melaksanakan kebijakan MBKM sesuai regulasi nasional, namun di sisi lain harus menyesuaikan dengan kondisi sumber daya yang terbatas. Kondisi ini seringkali memunculkan berbagai bentuk adaptasi lokal yang tidak secara eksplisit diatur dalam kebijakan nasional, tetapi menjadi solusi praktis dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Adaptasi lokal tersebut dapat berupa pengembangan program MBKM berbasis pemberdayaan desa, proyek pengabdian masyarakat, kerja sama dengan pemerintah daerah, atau program kewirausahaan lokal. Program-program tersebut mungkin tidak sepenuhnya sama dengan desain MBKM di perguruan tinggi besar, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pengalaman belajar nyata kepada mahasiswa. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tinggi bersifat kontekstual dan tidak dapat diseragamkan secara nasional.

Dengan demikian, studi tentang implementasi MBKM di Kota Bima tidak hanya penting untuk memahami bagaimana kebijakan dilaksanakan di daerah, tetapi juga penting untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dalam konteks lokal yang memiliki keterbatasan sumber daya dan struktur ekonomi yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori implementasi kebijakan pendidikan tinggi di daerah perifer, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kondisi daerah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan yang tidak hanya melihat implementasi MBKM dari perspektif evaluasi program atau persepsi mahasiswa, tetapi menganalisis MBKM sebagai proses negosiasi kebijakan antara struktur kebijakan nasional dan kapasitas institusi lokal, dengan menekankan pada konsep adaptasi lokal, resistensi kelembagaan, ketimpangan akses mahasiswa, serta improvisasi institusi dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional di wilayah perifer yang memiliki keterbatasan sumber daya dan jaringan kemitraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika implementasi kebijakan MBKM pada perguruan tinggi di Kota Bima dalam konteks sosial, kelembagaan, dan kebijakan pendidikan tinggi daerah. Penelitian diawali dengan studi literatur komprehensif terhadap berbagai publikasi ilmiah dan dokumen kebijakan terkait implementasi MBKM di Indonesia guna membangun kerangka konseptual dan landasan teoritis penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa, serta analisis dokumen institusi seperti kurikulum, laporan MBKM, dan dokumen kerja sama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola implementasi, hambatan kelembagaan, strategi adaptasi institusi, serta dampak implementasi MBKM terhadap pembelajaran dan keterlibatan mahasiswa di perguruan tinggi Kota Bima.

HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

Dialektika antara Antusiasme Kebijakan dan Keterbatasan Struktural dalam Implementasi MBKM

Dalam kerangka analisis kebijakan pendidikan tinggi kontemporer, kapasitas institusional tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai ketersediaan sumber daya administratif, melainkan sebagai konfigurasi kompleks yang mencakup integrasi kurikulum adaptif, sistem pelaporan berbasis kinerja, serta jejaring kolaboratif lintas sektor (Aswita, 2022). Berdasarkan hasil analisis dokumen, implementasi MBKM di Kota Bima memperlihatkan bahwa transformasi kebijakan nasional mengalami proses *institutional translation*, yaitu proses penerjemahan kebijakan ke dalam struktur operasional institusi yang bersifat kontekstual dan tidak seragam.

Secara khusus, kurikulum MBKM di perguruan tinggi Kota Bima menunjukkan kecenderungan sebagai *hybrid curriculum model*, yakni perpaduan antara kurikulum berbasis capaian pembelajaran (Outcome-Based Education) dengan fleksibilitas pembelajaran lintas konteks (Ulum et al., 2023). Namun, temuan menunjukkan bahwa integrasi tersebut belum sepenuhnya sistemik, melainkan masih bersifat parsial dan bergantung pada inisiatif program studi serta kapasitas individual dosen. Lebih lanjut, laporan MBKM yang dianalisis mengindikasikan adanya dominasi pendekatan administratif dalam pengukuran kinerja, di mana indikator keberhasilan lebih banyak diukur melalui kuantifikasi kegiatan (jumlah mahasiswa, jumlah program, jumlah mitra), dibandingkan dengan evaluasi substantif terhadap transformasi kompetensi mahasiswa. Hal ini menunjukkan adanya fenomena *administrative compliance bias*, yaitu kecenderungan institusi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaporan tanpa diikuti transformasi pedagogis yang mendalam.

Sementara itu, dokumen kerja sama memperlihatkan bahwa jejaring kemitraan yang dibangun oleh perguruan tinggi di Kota Bima cenderung bersifat lokalistik dan berbasis sektor publik, seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, dibandingkan dengan sektor industri. Kondisi ini merefleksikan keterbatasan struktur ekonomi regional, sekaligus menunjukkan adanya pola adaptasi institusional yang mengarah pada *community-based MBKM model*.

Dengan demikian, indikator pertama ini menegaskan bahwa kapasitas institusional dalam implementasi MBKM di Kota Bima tidak dapat dinilai secara normatif berdasarkan standar nasional, melainkan harus dipahami sebagai hasil interaksi antara struktur kebijakan, kapasitas organisasi, dan konteks sosial-ekonomi lokal.

Tabel 1. Analisis Kurikulum MBKM (Data Institusional)

Aspek Kurikulum	Temuan Empiris	Analisis Ilmiah	Implikasi Kebijakan
Struktur Kurikulum	Kurikulum telah mengadopsi skema MBKM (3 semester di luar prodi)	Menunjukkan <i>formal adoption</i> tanpa <i>substantive integration</i>	Perlu rekonstruksi kurikulum berbasis kompetensi kontekstual
Integrasi Mata Kuliah	Konversi SKS dilakukan, namun belum seragam	Terjadi <i>fragmented curriculum adaptation</i>	Standarisasi konversi berbasis learning outcomes
Peran Dosen	Dosen sebagai fasilitator sekaligus improvisator	Muncul fenomena <i>academic bricolage</i>	Penguatan kapasitas pedagogi dosen
Model Pembelajaran	Dominan berbasis proyek lokal	Adaptasi menuju <i>experiential learning</i> kontekstual	Pengakuan formal terhadap pembelajaran berbasis komunitas
Evaluasi Pembelajaran	Berbasis laporan kegiatan	<i>Outcome-based evaluation</i> belum optimal	Reformasi sistem evaluasi berbasis kompetensi

Tabel 2. Analisis Laporan MBKM

Komponen Laporan	Data dari Dokumen	Interpretasi Kritis	Masalah Struktural
Jumlah Mahasiswa	Meningkat setiap tahun	Indikator kuantitatif dominan	Tidak mencerminkan kualitas
Jenis Program	Magang, KKN Tematik, Proyek Desa	Dominasi program lokal	Keterbatasan akses eksternal
Output Laporan	Narasi kegiatan dan dokumentasi	<i>Administrative reporting orientation</i>	Minim evaluasi dampak
Indikator Keberhasilan	Partisipasi dan penyelesaian program	<i>Inflated success phenomenon</i>	Tidak berbasis outcome
Monitoring & Evaluasi	Tidak sistematis	Lemahnya <i>feedback mechanism</i>	Tidak ada perbaikan berkelanjutan

Tabel 3. Matriks Analisis Dokumen Kerja Sama

Jenis Mitra	Karakteristik	Peran dalam MBKM	Analisis Teoretis
Pemerintah Daerah	Dominan	Lokasi proyek & magang	<i>State-centric collaboration</i>
Lembaga Pendidikan	Moderat	Pertukaran pelajar terbatas	<i>Horizontal academic network</i>
Dunia Usaha	Sangat terbatas	Hampir tidak signifikan	<i>Weak industry linkage</i>
Komunitas Lokal	Tinggi	Basis program MBKM	<i>Community-based learning model</i>
NGO/Organisasi Sosial	Terbatas	Kegiatan sosial	<i>Social engagement model</i>

Jika dianalisis secara lebih mendalam, interaksi antara kurikulum, laporan MBKM, dan dokumen kerja sama membentuk suatu ekosistem implementasi yang bersifat *asymmetrical institutional capacity*. Artinya, terdapat ketidakseimbangan antara dimensi normatif kebijakan dengan kapasitas aktual institusi dalam mengimplementasikannya. Kurikulum sebagai instrumen formal kebijakan menunjukkan tingkat adopsi yang relatif tinggi, namun tidak diikuti oleh kesiapan epistemik dan pedagogis. Laporan MBKM sebagai instrumen akuntabilitas justru memperlihatkan kecenderungan reduksi kompleksitas pembelajaran menjadi sekadar indikator administratif. Sementara itu, dokumen kerja sama mencerminkan keterbatasan struktur ekonomi regional yang berdampak langsung pada terbatasnya variasi program MBKM.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai *adaptive implementation under constraint*, di mana institusi tidak sepenuhnya gagal, tetapi juga tidak sepenuhnya berhasil, melainkan beroperasi dalam ruang kompromi antara idealitas kebijakan dan realitas struktural. Lebih jauh, fenomena ini juga menunjukkan bahwa MBKM di Kota Bima mengalami proses *local institutional bricolage*, yaitu praktik adaptasi kreatif oleh aktor lokal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan kebijakan. Dosen dan pimpinan kampus berperan sebagai *policy translators*, bukan sekadar pelaksana kebijakan.

Namun demikian, tanpa intervensi struktural yang lebih kuat terutama dalam hal penguatan jejaring industri, reformasi sistem evaluasi, dan peningkatan kapasitas dosen maka implementasi MBKM berpotensi terjebak dalam *symbolic compliance*, yaitu kondisi di mana kebijakan tampak berjalan secara formal tetapi tidak menghasilkan transformasi substantif.

Ketimpangan Akses dan Formalisasi Evaluasi dalam Dinamika Implementasi MBKM

Indikator kedua dalam pembahasan ini berfokus pada dimensi ketimpangan akses dan problematika evaluasi yang muncul dalam implementasi MBKM, yang

secara keseluruhan merefleksikan paradoks kebijakan pendidikan tinggi di daerah perifer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun MBKM dirancang sebagai kebijakan yang inklusif dan demokratis, dalam praktiknya terdapat diferensiasi akses yang signifikan di antara mahasiswa, yang sebagian besar ditentukan oleh faktor sosial-ekonomi dan kapasitas digital.

Mahasiswa dengan latar belakang ekonomi yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk mengakses program MBKM yang berskala nasional atau internasional. Mereka dapat mengikuti pertukaran pelajar, magang di perusahaan besar, atau program studi independen yang membutuhkan biaya tambahan. Sebaliknya, mahasiswa dari kelompok ekonomi lemah cenderung terjebak dalam program internal yang memiliki keterbatasan dalam hal pengalaman dan jejaring. Fenomena ini mengonfirmasi teori educational inequality, yang menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang tidak merata akan menghasilkan ketimpangan dalam akses terhadap peluang pendidikan (Fuadi & Irdalisa, 2022).

Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada pengalaman belajar mahasiswa, tetapi juga berimplikasi pada reproduksi stratifikasi sosial dalam jangka panjang. Mahasiswa yang memiliki akses terhadap program MBKM yang lebih berkualitas akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja, sementara mereka yang terbatas pada program lokal akan menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan keterampilan dan jaringan profesional. Dengan demikian, MBKM yang diharapkan menjadi instrumen mobilitas sosial justru berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah ada.

Di sisi lain, mekanisme evaluasi MBKM juga menunjukkan kelemahan yang signifikan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa evaluasi program masih didominasi oleh pendekatan administratif yang bersifat formalistik, di mana keberhasilan diukur berdasarkan kelengkapan laporan naratif, bukan pada capaian substantif mahasiswa. Praktik ini mencerminkan adanya bias birokratis dalam sistem evaluasi, di mana aspek dokumentasi lebih diutamakan dibandingkan dengan kualitas pembelajaran.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif akuntabilitas kebijakan, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara accountability dan performance. Dalam kasus MBKM, akuntabilitas administratif tampaknya lebih dominan dibandingkan dengan evaluasi kinerja substantif, sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai inflated success, yaitu kondisi di mana program terlihat berhasil secara administratif tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan secara nyata (Arsyad & Widuhung, 2022).

Kelemahan evaluasi ini juga berkaitan dengan absennya indikator yang jelas dalam mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Tanpa instrumen evaluasi yang komprehensif, sulit untuk menilai sejauh mana MBKM *действительно* berhasil dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada outcome dan impact.

Lebih jauh, adaptasi lokal yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Kota Bima sebenarnya menunjukkan potensi inovasi yang signifikan. Program berbasis komunitas, proyek desa, dan kegiatan sosial yang dikembangkan oleh kampus-kampus lokal merupakan bentuk implementasi MBKM yang kontekstual dan

relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam kerangka evaluasi yang masih berorientasi pada standar nasional yang seragam, inovasi-inovasi ini sering kali tidak mendapatkan pengakuan yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam menilai keberhasilan MBKM, dari yang semula berbasis pada keseragaman menjadi berbasis pada kontekstualitas. Pengakuan terhadap keberagaman bentuk implementasi akan memberikan ruang bagi perguruan tinggi di daerah untuk mengembangkan inovasi tanpa harus terjebak dalam standar yang tidak realistis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa dinamika yang dikaji memperlihatkan relasi kausalitas yang kompleks antara struktur kelembagaan, kapasitas aktor, dan konteks sosial-ekonomi yang melingkupinya, sehingga menghasilkan konfigurasi kebijakan yang tidak selalu linier, melainkan adaptif dan kontingen. Temuan utama menunjukkan bahwa efektivitas intervensi sangat ditentukan oleh kemampuan integratif antar sektor, konsistensi implementasi, serta keberlanjutan mekanisme evaluasi berbasis data. Selain itu, terdapat indikasi kuat bahwa kesenjangan struktural dan asimetri informasi masih menjadi variabel penghambat yang signifikan. Secara teoretis, studi ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus mengenai pendekatan sistemik dan interdisipliner dalam analisis kebijakan publik. Ke depan, diperlukan eksplorasi lebih lanjut yang menitikberatkan pada inovasi model kolaboratif dan penguatan kapasitas institusional guna memastikan keberlanjutan dan skalabilitas dampak kebijakan secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Al Anshori, F., & Syam, S. (2021). Persepsi Mahasiswa Pendidikan Biologi Terhadap Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Biogenerasi*, 6(2), 147–153. <https://doi.org/10.30605/biogenerasi.v6i2.1387>
- Arisandi, D., Widya Mutiara, M., & Christanti Mawardi, V. (2022). Dampak Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MbkM) Magang Dan Studi Independen Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 174–181. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.16163.2022>
- Arsyad, A. T., & Widuhung, S. D. (2022). Dampak Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Kualitas Mahasiswa. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(2), 88. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i2.1027>
- Aswita, D. (2022). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MbkM): Inventarisasi Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 9(2), 56. <https://doi.org/10.22373/pbio.v9i2.11747>
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205. <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>
- Dewi, U., Sumarno, A., & Susarno, L. H. (2022). PEMBELAJARAN DARING UNTUK Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Online Learning to Support The Implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(01), 1–14. <https://doi.org/10.31800/jtp.kw>
- Fachri, B., Rizal, C., & Supiyandi. (2024). Penerapan Metode Waterfall Dalam

- Perancangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Berbasis Web. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi (JUKTISI)*, 2(3), 591–597. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v2i3.147>
- Fuadi, T. M. (2022). The concept of Independent Learning-Independent Campus (MBKM): Application in Biology Education. *Prosiding Seminar Nasional Biotik*, 9(2), 38.
- Fuadi, T. M., & Irdalisa, I. (2022). Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Application in Education Faculty. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2747–2756. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1125>
- Jufriadi, A., Huda, C., Aji, S. D., Pratiwi, H. Y., & Ayu, H. D. (2022). Analisis Keterampilan Abad 21 Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 39–53. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.2482>
- Krishnapatria, K. (2021). MBKM Curriculum in English Studies Program: Challenges and Opportunities. *ELT in Focus*, 4(1), 15–38. <https://doi.org/10.35706/eltinf.v4i1.5276>
- Mailin, M. (2021). Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, 4(1), 68–75. <https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.59>
- Mariati, M. (2021). Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. 747–758. <https://doi.org/10.53695/SINTESA.V1I1.405>
- Mudrikah, A., Khori, A., Hamdani, H., Holik, A., Hakim, L. L., Yasmadi, B., & Hidayat, H. (2022). Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Islam Nusantara. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(01), 137. <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2177>
- Muh. Hasan Marwiji, Bambang Qomaruzzaman, & Qiqi Yuliaty Zaqiah. (2023). Inovasi Dalam Bidang Kurikulum: Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan Penerapannya. *Jurnal Educatio*, 9(4), 1–10. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.6283>
- Mutmainah, I., Yulia, I. A., Marnilin, F., & Mahfudi, A. Z. (2022). GAP Analysis Untuk Mengetahui Kinerja Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(1), 19–34. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.934>
- Purwanti, E. (2021). *Preparing the Implementation of Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Policy in Higher Education Institutions*. 518(ICoSIHESS 2020), 384–391. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.149>
- Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Jurnal Nasional Hukum*, 7(2), 425–434.
- Santri Fahmi, S. F. S. F. (2022). Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 2(1), 92–97. <https://doi.org/10.56672/attadris.v2i1.70>
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 30–38. <https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.230>
- Suandi, M. (2018). Belajar dan Pembelajaran. *Deepublish Publisher*, 9(1), 210–220.
- Suteja, J. (2020). Kampus Merdeka : Merdeka Belajar. *Pasundan, Universitas, June*, 13–16. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about>
- Ulum, B., Fatimah, E., Hayati, N., Margio Reta, E., & Rosyid, A. (2023). Konsep Dan

- Penerapan Kurikulum Mbkm (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Jurnal Citra Pendidikan*, 3(1), 671–675. <https://doi.org/10.38048/jcp.v3i1.1456>
- Widawati, W., & Anwar, M. (2023). *Perancangan Basis Data Mitra Kerjasama UNP Guna Optimalisasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka E LEKTIF: Jurnal Elektronika & Informatika Konsep Kerjasama atau Kolaborasi*. 1(1), 1–10.
- Yanuarsari, R., Iwan Asmadi, Muchtar, H. S., & Rita Sulastini. (2022). Peran Program Merdeka Belajar Kampus. *Jurnal Comm-Edu*, 5(2), 52–62. <https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu/index>